

LAPORAN INTERIM

KINERJA TRIWULAN-I

JANUARI
- MARET
2026

BALAI PELAKSANA
PENYEDIAAN
PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PAPUA I



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat karuniaNya, Penyusunan Laporan Interim Kinerja Triwulan ke-I (Bulan Januari-Maret) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dapat terselesaikan. Pengukuran Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebagai Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan secara berkala setiap triwulan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026. Laporan ini memuat target dan capaian progres fisik maupun keuangan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan akhir bulan Maret Tahun 2026 dengan permasalahan yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang akan dan telah dilakukan. Akhir kata, kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, partisipasi maupun dukungannya dalam penyusunan laporan ini, disampaikan terima kasih.

Jayapura, 6 April 2026

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I**



Ir. P. M. Desyarmeda Kilian, S.T., M.Si.
NIP. 19791227 200605 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi	1
1.4 Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
1.5 Keluaran	4
1.6 Sistematika Laporan	4
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN.....	5
2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan I Balai P3KP Papua I	5
2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Balai P3KP Papua I	12
BAB III PENUTUP	29
3.1 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut	29
LAMPIRAN Dokumentasi Kegiatan Balai P3KP Papua I Triwulan I (Januari – Maret) TA. 2026.....	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik yang mencakup pengukuran kinerja tahunan, serta evaluasi kinerja triwulan dan tahunan.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I wajib menyiapkan, menyusun dan menyerahkan laporan kinerja tertulis secara berkala. Laporan kinerja bertujuan untuk menyampaikan pencapaian kinerja tahun anggaran berdasarkan proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjelaskan berhasil tidaknya tingkat kinerja yang dicapai.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I menjabarkan target pencapaian tahun 2026 dalam bentang waktu per-triwulan (3 bulan). Besaran target kinerja triwulan ini menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Interim Kinerja Triwulan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan pelaporan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I triwulan I ini adalah untuk mengukur capaian progres realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan dihadapi untuk dapat dilakukan tindak lanjut penyelesaian.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maka tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I adalah :

“ Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial dan fasilitasi serah terima aset.”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

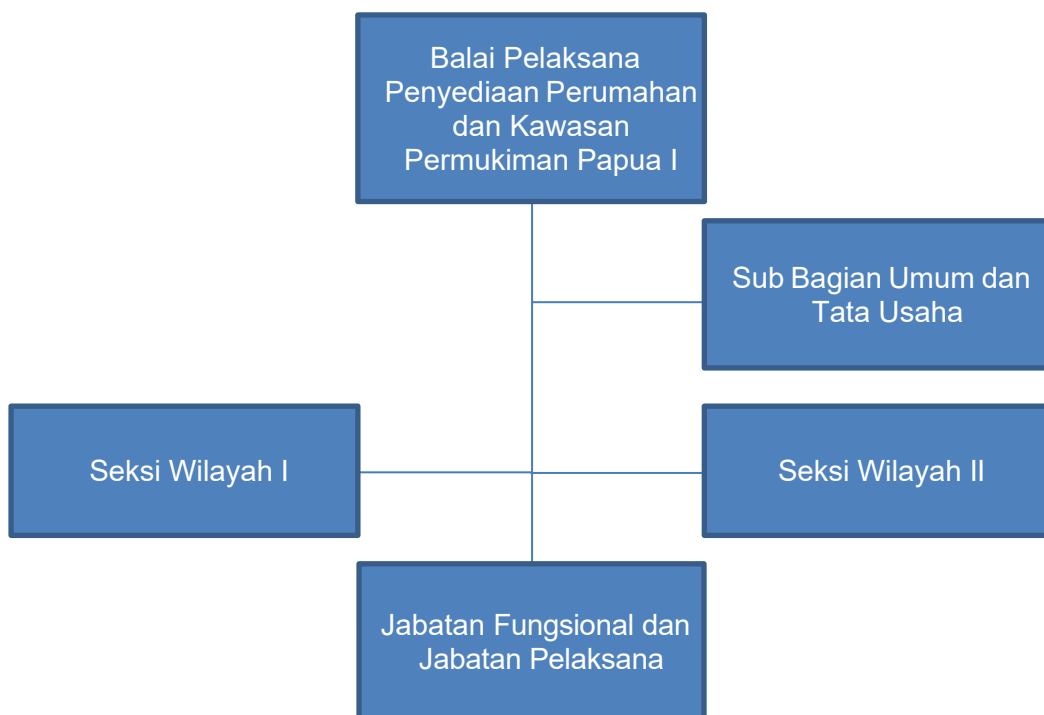
Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I terdiri atas :

- Subbagian Umum dan Tata Usaha
- Seksi Pelaksanaan Wilayah I

- Seksi Pelaksanaan Wilayah II
- Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I membawahi 2 (dua) satuan kerja yaitu Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.

Adapun struktur organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



1.4 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup kegiatan kegiatan pelaporan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I triwulan I Tahun 2026 meliputi :

1. Monitoring progres realisasi penyerapan dana belanja barang dan belanja modal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I;
2. Monitoring progres realisasi penyerapan dana kebijakan sarana dan prasarana, layanan perencanaan dan penganggaran, fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah, layanan perkantoran, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I; dan
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Satuan Kerja di bawah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

1.5 Keluaran

Keluaran Laporan Interim Kinerja Triwulan ini berupa Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I yang dilakukan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun anggaran dan mana yang mencakup :

1. Gambaran perkembangan penyerapan keuangan seluruh kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I setiap triwulannya;
2. Gambaran realisasi pencapaian progres fisik dan keuangan seluruh kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I setiap triwulannya; dan
3. Gambaran tentang kendala dan permasalahan yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pencapaian progres yang telah direncanakan setiap triwulannya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika laporan Interim Kinerja Triwulan yang digunakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, keluaran dan sistematika pelaporan.

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pada Bab ini menjelaskan target penetapan kinerja maupun capaian kinerja meliputi target kinerja program dan target kinerja kegiatan triwulanan.

BAB III PENUTUP

Pada Bab ini berisi rangkuman permasalahan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setiap triwulannya.

BAB II

TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

2.1 Target Penetapan Kinerja Triwulan I Balai P3KP Papua I

Pada Triwulan ke-1 (Januari – Maret) TA. 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I bertanggungjawab mengelola anggaran dengan total sebesar Rp 304.808.064.000 yang terdiri dari pagu satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I sebesar Rp. 3.213.138.000 (5 DIPA) dan pagu satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua sebesar Rp. 301.594.926.000 (4 DIPA), dengan rincian target kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Target Keuangan dan Fisik Triwulan I

No	Program	Januari			Februari			Maret		
		Pagu (Rp)	Target Keu (%)	Target Fisik (%)	Pagu (Rp)	Target Keu (%)	Target Fisik (%)	Pagu (Rp)	Target Keu (%)	Target Fisik (%)
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I										
1	Program Dukungan Manajemen	1.889.197.000	3.84	0	1.889.197.000	10.74	0	1.889.197.000	21.8	48.1
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	353.828.000	3.43	0	353.828.000	6.89	0	353.828.000	10.41	41.9
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perdesaan)	356.166.000	0.89	0	356.166.000	1.86	0	356.166.000	3.92	49
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkotaan)	389.211.000	0.85	0	362.207.000	2.09	0	362.207.000	3.94	10.9
5	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (TKPR)	145.737.000	5.34	0	145.737.000	11.45	0	145.737.000	17.81	0
TOTAL		3.134.139.000			3.213.138.000			3.213.138.000		
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua										
1	Program Dukungan Manajemen	1.120.850.000	00.00	0.80	1.120.850.000	2.23	7.09	1.120.850.000	4.46	16.60
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.903.000	00.00	00.00	55.427.583.000	00.00	0.68	55.427.583.000	0.12	2.03

3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perdesaan)	18.166.637.000	00.00	00.00	204.600.232.000	00.00	0.27	204.600.232.000	00.00	0.88
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkotaan)	57.986.000	00.00	00.00	40.446.261.000	00.00	00.00	40.446.261.000	0.05	0.34
TOTAL		19.416.376.000			301.594.926.000			301.594.926.000		

Adapun target kinerja kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua pada triwulan ke-1 TA. 2026 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Target Kinerja Balai P3KP Papua I Triwulan I

Unor: Sekretariat Jenderal							
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
					Januari	Februari	Maret
1	Layanan Umum Balai P3KP Papua I	1 Layanan	82.136.000	82.136.000	0	0	48,1
2	Administrasi Kegiatan BP3KP Papua I	1 Layanan	1.024.380.000	1.028.069.000	0	0	48,1
3	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Balai P3KP Papua I	1 Laporan	18.648.000	31.835.000	0	0	48,1
4	Pengadaan Pengolah Data BP3KP Papua I	1 Laporan	43.187.000	0	0	0	48,1
5	Langganan Daya dan Jasa	1 Unit	198.000.000	198.000.000	0	0	48,1
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Unit	74.550.000	91.459.000	0	0	48,1
7	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Unit	448.296.000	427.698.000	0	0	48,1
TOTAL			1.889.197.000	1.859.197.000	0.00	0.00	48.10
Unor: Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman							
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
					Jan	Feb	Mar
1	Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai P3KP Papua I	1 Dokumen	33.427.000	18.332.000	0	0	41,9
2	Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Balai P3KP Papua I	1 Dokumen	93.900.000	66.829.000	0	0	41,9
3	Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kebijakan	114.861.000	85.901.000	0	0	41,9
4	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Balai P3KP Papua I	1 Layanan	57.758.000	52.201.000	0	0	41,9

5	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi pada Balai P3KP Papua I	1 Layanan	12.382.000	12.116.000	0	0	41,9
6	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Balai P3KP Papua I	1 Layanan	41.500.000	40.668.000	0	0	41,9
TOTAL			353.828.000	276.047.000	0.00	0.00	41.90

Unor: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RAKAL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
					Jan	Feb	Mar
1	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Pedesaan	1 Kebijakan	25.000.000	8.244.000	0	0	49
2	Verifikasi Calon Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Kebijakan	122.521.000	130.285.000	0	0	49
3	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	198.007.000	62.088.000	0	0	49
4	Publikasi Data dan Informasi Bidang Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	51.273.000	19.715.000	0	0	49
5	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan di Balai P3KP Papua I	1 Laporan	22.400.000	9.842.000	0	0	49
6	Layanan Umum Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	1 Layanan	22.500.000	22.500.000	0	0	49
7	Publikasi Data dan Informasi Balai P3KP Papua I	1 Layanan	20.468.000	20.468.000	0	0	49
TOTAL			462.169.000	273.142.000	0.00	0.00	49.00

Unor: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RAKAL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
					Jan	Feb	Mar
1	Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	60.514.000	32.544.000	0	0	10,9
2	Fasilitasi Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan	36.443.000	36.443.000	0	0	10,9
3	Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan	36.443.000	22.643.000	0	0	10,9
4	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan	65.291.000	23.127.000	0	0	10,9
5	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan	65.500.000	41.225.000	0	0	10,9
6	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Laporan	53.965.000	37.204.000	0	0	10,9

7	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Layanan	14.641.000	14.641.000	0	0	10,9
8	Publikasi Data dan Informasi Publik bidang Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Layanan	14.020.000	14.020.000	0	0	10,9
9	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya di Balai P3KP Papua I	1 Layanan	15.390.000	15.390.000	0	0	10,9
TOTAL			362.207.000	237.237.000	0.00	0.00	10.90
Unor: Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Rencana Fisik Per Bulan		
					Jan	Feb	Mar
1	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	32.806.000	20.347.000	0	0	0
2	Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	46.503.000	37.150.000	0	0	0
3	Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai P3KP Papua I	1 Laporan	44.459.000	17.359.000	0	0	0
4	Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Lapdu	21.969.000	33.861.000	0	0	0
TOTAL			145.737.000	108.717.000	0.00	0.00	0.00

Tabel 2. 3 Target Kinerja Satuan Kerja PKP Provinsi Papua Triwulan I

Unor : Sekretariat Jenderal							
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu Rkaki (Rp.)	Rencana Fisik		
					Januari	Februari	Maret
1	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	415.403.000	415.403.000	2	5	10
2	Layanan Daya Dan Jasa	1 Layanan	252.000.000	252.000.000	0	8,33	16,66
3	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	1 Layanan	270.610.000	270.610.000	0	10	30
4	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	108.288.000	108.288.000	0	8,33	16,66
5	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kesatkeran	1 Layanan	33.326.000	33.326.000	2	5	10
6	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Kantor Satuan Kerja Pkp Provinsi Papua	1 Layanan	41.223.000	41.223.000	0	0	0
Total			1.120.850.000	1.120.850.000	0.80	7.09	16.60
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu Rkaki	Rencana Fisik		
			(Rp.)	(Rp.)	Jan	Feb	Mar
1	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps)	1800 Unit	46.500.000.000	46.500.000.000	0	0	0

2	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps	1 Layanan	8.856.680.000	7.189.518.000	0	5	15
3	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Pada Satker Pkp Provinsi Papua	1 Layanan	70.903.000	70.903.000	0	8	15
Total			55.427.583.000	53.760.421.000	0.00	0.68	2.03
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu Rkaki	Rencana Fisik		
			(Rp.)	(Rp.)	Jan	Feb	Mar
1	Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo	1 Paket	8.342.032.000	8.342.032.000	0	0	0
2	Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya	1 Paket	8.521.195.000	8.521.195.000	0	0	0
3	Mebel Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya	1 Paket	1.282.500.000	1.282.500.000	0	0	0
4	Mebel Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo	1 Paket	835.682.000	835.682.000	0	0	0
5	Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya	1 Paket	405.110.000	405.110.000	0	0	0
6	Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo	1 Paket	398.632.000	398.632.000	0	0	0
7	Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Sekolah Yayasan Mitra Misi Baptis Jayawijaya	1 Paket	313.030.000	186.128.000	0	5	15
8	Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Anggen Fano Dekai Yahukimo	1 Paket	308.551.000	182.239.000	0	5	15
9	Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	105.239.000	60.440.000	0	5	15
10	Perencanaan Rumah Khusus Papua Pegunungan	1 Unit	4.650.600.000	4.146.960.000	0	0	3
11	Pembayaran Tunggalan Pembangunan Rumah Susun Asn Pemprov Papua Tengah	1 Paket	11.659.000.000	11.659.000.000	0	0	0

12	Pembayaran Tunggalan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Asn Pemprov Papua Tengah	1 Paket	400.000.000	400.000.000	0	0	0
13	Pembayaran Tunggalan Perjalanan Dinas Pembangunan Rumah Susun Dan Rumah Khusus Asn Pemprov Papua Selatan	1 Paket	180.000.000	181.543.000	0	0	0
14	Pengawasan Pembangunan Rumah Susun Asn Pemprov Papua Tengah	1 Paket	198.857.000	0	0	0	0
15	Layanan Umum Pada Satker Pkp Provinsi Papua	1 Layanan	30.130.000	30.130.000	0	8	15
16	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Perdesaan Di Provinsi Papua	600 Unit	16.500.000.000	16.500.000.000	0	0	0
17	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Perdesaan Di Provinsi Papua Selatan	900 Unit	24.000.000.000	24.000.000.000	0	0	0
18	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Perdesaan Di Provinsi Papua Tengah	2100 Unit	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0	0
19	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Perdesaan Di Provinsi Papua Pegunungan	2100 Unit	58.500.000.000	58.500.000.000	0	0	0
20	Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bsps Perdesaan Di Provinsi Papua	1 Laporan	1.161.211.000	1.161.211.000	0	5	15
21	Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bsps Perdesaan Di Provinsi Papua Selatan	1 Laporan	1.446.961.000	1.446.961.000	0	5	15
22	Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bsps Perdesaan Di Provinsi Papua Tengah	1 Laporan	3.775.454.000	3.775.454.000	0	5	15
23	Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bsps Perdesaan Di Provinsi Papua Pegunungan	1 Laporan	4.016.495.000	4.016.495.000	0	5	15
Total			201.030.679.000	200.031.712.000	0.00	0.27	0.88
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu Rkaki	Rencana Fisik		
			(Rp.)	(Rp.)	Jan	Feb	Mar

1	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Di Satker Pkp Provinsi Papua	1 Laporan	30.186.000	27.610.000	0	5	15
2	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provinsi Papua	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0
3	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provinsi Papua Selatan	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0
4	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provinsi Papua Tengah	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0
5	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provinsi Papua Pegunungan	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0
6	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provisini Papua	1 Layanan	815.532.000	680.532.000	0	0	5
7	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provisini Papua Selatan	1 Layanan	894.585.000	784.585.000	0	0	5
8	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provisini Papua Tengah	1 Layanan	1.103.866.000	843.442.000	0	0	5
9	Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Dan Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Provisini Papua Pegunungan	1 Layanan	1.587.292.000	1.039.216.000	0	0	5
10	Layanan Umum Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Layanan	14.800.000	14.800.000	3	5	10
11	Perencanaan Penanganan Kumuh Perkotaan	1 Paket	140.267.000	140.267.000	0	0	0
12	Pelaksanaan Penanganan Kumuh Perkotaan	15 Hektar	8.743.324.000	8.743.324.000	0	0	0
13	Supervisi Penanganan Kumuh Perkotaan	1 Paket	280.000.000	280.000.000	0	0	0

14	Pengawasan Pengendalian Penanganan Kumuh Perkotaan	1 Layanan	187.557.000	162.557.000	0	0	0
15	Perencanaan Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	1 Paket	24.000.000	24.000.000	0	0	0
16	Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	200 Unit	2.280.000.000	2.280.000.000	0	0	0
17	Supervisi Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	1 Paket	57.000.000	57.000.000	0	0	0
18	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	1 Layanan	39.000.000	39.000.000	0	0	0
Total			52.197.409.000	51.116.333.000	0.00	0.00	0.34

Target indikator kinerja kegiatan mencakup keseluruhan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua. Target ini menunjukkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua memiliki tanggung jawab menerus (*in line*) terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan kawasan Permukiman.

2.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Balai P3KP Papua I

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua pada tahun 2026 memiliki target sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 dengan capaian Kinerja program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Kegiatan Balai P3KP Papua I

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
Unor : Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya hunian layak		
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan sistem dan strategi			
SK	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni		
Output :			
1	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	1 rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 2 : Penyediaan rumah layak huni			

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		
Output :			
1	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Kegiatan : Dukungan manajemen Penyelenggaraan Perumahan			
SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Output :			
1	Jumlah layanan umum	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
2	Jumlah layanan data dan informasi	1 layanan	Satker BP3KP Papua I
3	Jumlah layanan BMN	1 layanan	Satker BP3KP Papua I
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya hunian layak		
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi			
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan		
1	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	2 laporan	Satker BP3KP Papua I Satker PKP Provinsi Papua
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
SK	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan		
1	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	1 dokumen	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan			
SK	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan		
Output :			
1	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan perdesaan	1 kegiatan	Satker BP3KP Papua I

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
Kegiatan 4 : Penyediaan Rumah Layah Huni			
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan		
Output :			
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	1 rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan perdesaan	1 laporan	Satker BP3KP Papua I
3	Jumlah unit rumah susun asrama pendidikan keagamaan	42 unit	Satker PKP Provinsi Papua
Kegiatan 5: Peningkatan Kualitas Perumahan			
SK	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan		
Output :			
1	Jumlah kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	1 rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Papua I		
1	Jumlah layanan umum	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
2	Jumlah layanan data dan informasi	1 layanan	Satker BP3KP Papua I
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya hunian layak		
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi			
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan		
Output :			
1	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan	2 Laporan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum			
SK	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan		
Output :			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan			

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
SK	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan wilayah perkotaan		
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 4 : Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Perkotaan			
SK	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni baru di perkotaan		
Output :			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Kegiatan 5 : Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan			
SK	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas Pembangunan perumahan di wilayah perkotaan		
Output :			
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Kegiatan : Dukungan manajemen Penyelenggaraan Perumahan			
SK	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen		
Output :			
1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan	Satker BP3KP Papua I
2	Jumlah Layanan Umum	2 Layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Satker BP3KP Papua I
Unor : Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SP	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
Kegiatan : Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SK	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		
Output :			
1	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
SK	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	Satker BP3KP Papua I
SK	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		
1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi kebijakan	Satker BP3KP Papua I

Indikator Kinerja/Output		Target 2026	Unit Kerja Pelaksana
Unor : Sekretariat Jenderal			
Program Dukungan Manajemen			
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Papua I		
Kegiatan : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			
SK	Meningkatnya dukungan manajemen BP3KP Papua I		
Output :			
1	Jumlah layanan umum	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
2	Jumlah layanan perkantoran	2 layanan	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua
3	Jumlah layanan sarana internal	2 unit	Satker BP3KP Papua I, Satker PKP Provinsi Papua

Capaian kinerja per *output* kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua pada triwulan ke-1 (Januari-Maret) TA 2026 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Capaian Kinerja BP3KP Papua I Triwulan I

Unor: Sekretariat Jenderal										
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Layanan Umum Balai P3KP Papua I	1 Layanan	82.136.000	82.136.000	50.669.011	61,69	61,55	5	60,56	60,66
2	Administrasi Kegiatan BP3KP Papua I	1 Layanan	1.024.380.000	1.028.069.000	539.458.310	52,47	60,25	2	7	56,52
3	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Balai P3KP Papua I	1 Laporan	18.648.000	31.835.000	0	0	8	2	4	6
4	Pengadaan Pengolah Data BP3KP Papua I	1 Laporan	43.187.000	0	0	0	8	2	4	6
5	Langganan Daya dan Jasa	1 Unit	198.000.000	198.000.000	68.842.579	34,77	60,25	2	7	56,52
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1 Unit	74.550.000	91.459.000	42.300.000	46,25	60,25	2	7	56,52
7	Honor Operasional Satuan Kerja	1 Unit	448.296.000	427.698.000	379.778.000	88,8	60,25	2	7	56,52
TOTAL			1.889.197.000	1.859.197.000	1.081.047.900	58,15	59,41	2,13	9,31	55,84
Unor: Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Pengelolaan Data dan Informasi Program Satu Juta Rumah di Kawasan Pesisir di Balai P3KP Papua I	1 Dokumen	33.427.000	18.332.000	3.271.134	17,84	17,94	2	6	8
2	Pemenuhan Readiness Criteria Lokasi Penanganan Kumuh dan Pengembangan	1 Dokumen	93.900.000	66.829.000	50.196.579	75,11	65,67	2	15,82	42,09

	Kawasan Permukiman pada Balai P3KP Papua I									
3	Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Kebijakan	114.861.000	85.901.000	42.617.914	49,61	49,71	2	4	12,55
4	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Balai P3KP Papua I	1 Layanan	57.758.000	52.201.000	32.362.090	62	58,27	2	54,55	56,53
5	Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi pada Balai P3KP Papua I	1 Layanan	12.382.000	12.116.000	0	0	8	2	4	6
6	Penatausahaan BMN Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Balai P3KP Papua I	1 Layanan	41.500.000	40.668.000	31.326.935	77,03	81,59	2	77,4	79,31
TOTAL			353.828.000	276.047.000	159.774.652	57,88	55,95	2.00	27.37	37.26
Unor: Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Pedesaan	1 Kebijakan	25.000.000	8.244.000	0	0	8	2	4	6
2	Verifikasi Calon Penerima Bantuan Penigkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Kebijakan	122.521.000	130.285.000	121.880.533	93,55	93,69	2	4	89,34
3	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	198.007.000	62.088.000	47.568.729	76,62	76,72	2	6,33	8,33
4	Publikasi Data dan Informasi Bidang Perumahan Perdesaan	1 Dokumen	51.273.000	19.715.000	11.725.922	59,48	59,58	2	22,87	24,87
5	Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perdesaan di Balai P3KP Papua I	1 Laporan	22.400.000	9.842.000	0	0	8	2	4	6
6	Layanan Umum Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I	1 Layanan	22.500.000	22.500.000	0	0	8	2	4	6
7	Publikasi Data dan Informasi Balai P3KP Papua I	1 Layanan	20.468.000	20.468.000	0	0	8	2	4	6
TOTAL			462.169.000	273.142.000	181.175.184	66,33	68,22	2.00	5.89	47.64
Unor: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Perencanaan dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	60.514.000	32.544.000	0	0	8	2	4	6
2	Fasilitasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan	1 Kebijakan	36.443.000	36.443.000	27.497.260	75,45	75,55	2	4	21,72

	Penghunian Perumahan Perkotaan									
3	Fasilitasi dan Pemantauan Penyaluran Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan	36.443.000	22.643.000	19.681.055	86,92	47,26	2	4	6
4	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan	65.291.000	23.127.000	17.872.384	77,28	8	2	4	6
5	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Kebijakan	65.500.000	41.225.000	39.087.793	94,82	67,57	2	4	12,09
6	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Laporan	53.965.000	37.204.000	24.254.565	65,19	58,05	2	4	6
7	Layanan Umum Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Layanan	14.641.000	14.641.000	0	0	8	2	4	6
8	Publikasi Data dan Informasi Publik bidang Perumahan Perkotaan di Balai P3KP Papua I	1 Layanan	14.020.000	14.020.000	0	0	8	2	4	6
9	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya di Balai P3KP Papua I	1 Layanan	15.390.000	15.390.000	10.889.500	70,76	70,92	0	2	70,79
TOTAL			362.207.000	237.237.000	139.282.557	58,71	44,41	1.87	3.87	13.68
Unor: Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan	Pagu RKAKL	Realisasi	Progres (%)		Progres Fisik Per Bulan		
			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	32.806.000	20.347.000	0	0	8	2	4	6
2	Penerapan Manajemen Risiko Balai P3KP Papua I	1 Kebijakan	46.503.000	37.150.000	0	0	8	2	4	6
3	Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Balai P3KP Papua I	1 Laporan	44.459.000	17.359.000	0	0	8	2	4	6
4	Pemantauan dan Pendampingan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Lapdu	21.969.000	33.861.000	9.180.000	27,11	11	5	7	9
TOTAL			145.737.000	108.717.000	9.180.000	8,44	8,93	2.93	4.93	6.93

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Satker PKP Papua Triwulan I

Unor : Sekretariat Jenderal										
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	1 Layanan	415.403.000	415.403.000	0	0	0	0	0	0
2	LAYANAN DAYA DAN JASA	1 Layanan	252.000.000	252.000.000	0	0	0	0	0	0
3	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	1 Layanan	270.610.000	270.610.000	0	0	0	0	0	0

4	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	1 Layanan	108.288.000	108.288.000	0	0	0	0	0	0
5	Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kesatkeran	1 Layanan	33.326.000	33.326.000	0	0	0	0	0	0
6	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Satuan Kerja PKP Provinsi Papua	1 Layanan	41.223.000	41.223.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1.120.850.000	1.120.850.000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Unor : Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)	1800 Unit	46.500.000.000	46.500.000.000	0	0	0	0	0	0
2	PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)	1 Layanan	8.856.680.000	7.189.518.000	215.685.540	3	3	0	1	3
3	Layanan Umum Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman pada Satker PKP Provinsi Papua	1 Layanan	70.903.000	70.903.000	30.488.290	43	43	0	10	43
TOTAL			55.427.583.000	53.760.421.000	246.173.830	0,46	0,46	0.00	0.15	0.46

Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar
1	LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEKOLAH PENGGERAK ANGGEN FANO DEKAI YAHUKIMO	1 Paket	8.342.032.000	8.342.032.000	0	0	0	0	0	0
2	LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEKOLAH YAYASAN MITRA MISI BAPTIS JAYAWIJAYA	1 Paket	8.521.195.000	8.521.195.000	0	0	0	0	0	0
3	MEBEL RUMAH SUSUN SEKOLAH YAYASAN MITRA MISI BAPTIS JAYAWIJAYA	1 Paket	1.282.500.000	1.282.500.000	0	0	0	0	0	0
4	MEBEL RUMAH SUSUN SEKOLAH PENGGERAK ANGGEN FANO DEKAI YAHUKIMO	1 Paket	835.682.000	835.682.000	0	0	0	0	0	0

5	KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEKOLAH YAYASAN MITRA MISI BAPTIS JAYAWIJAYA	1 Paket	405.110.000	405.110.000	0	0	0	0	0	0
6	KONSULTAN PENGAWAS LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEKOLAH PENGGERAK ANGGEN FANO DEKAI YAHUKIMO	1 Paket	398.632.000	398.632.000	0	0	0	0	0	0
7	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEKOLAH YAYASAN MITRA MISI BAPTIS JAYAWIJAYA	1 Paket	313.030.000	186.128.000	0	0	0	0	0	0
8	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEKOLAH PENGGERAK ANGEN FANO DEKAI YAHUKIMO	1 Paket	308.551.000	182.239.000	0	0	0	0	0	0
9	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERDESAAN	1 Laporan	105.239.000	60.440.000	0	0	0	0	0	0
10	PERENCANAAN RUMAH KHUSUS PAPUA PEGUNUNGAN	1 Unit	4.650.600.000	4.146.960.000	0	0	0	0	0	0
11	PEMBAYARAN TUNGGAKAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN ASN PEMPROV PAPUA TENGAH	1 Paket	11.659.000.000	11.659.000.000	0	0	0	0	0	0
12	PEMBAYARAN TUNGGAKAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN ASN PEMPROV PAPUA TENGAH	1 Paket	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	0	0
13	PEMBAYARAN TUNGGAKAN PERJALANAN DINAS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS ASN PEMPROV PAPUA SELATAN	1 Paket	180.000.000	181.543.000	0	0	0	0	0	0
14	PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN ASN PEMPEPROV PAPUA TENGAH	1 Paket	198.857.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Layanan Umum pada Satker PKP Provinsi Papua	1 Layanan	30.130.000	30.130.000	0	0	0	0	0	0

16	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA	600 Unit	16.500.000.000	16.500.000.000	0	0	0	0	0	0
17	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN	900 Unit	24.000.000.000	24.000.000.000	0	0	0	0	0	0
18	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	2100 Unit	54.000.000.000	54.000.000.000	0	0	0	0	0	0
19	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	2100 Unit	58.500.000.000	58.500.000.000	0	0	0	0	0	0
20	PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BSPS PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA	1 Laporan	1.161.211.000	1.161.211.000	0	0	0	0	0	0
21	PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BSPS PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA SELATAN	1 Laporan	1.446.961.000	1.446.961.000	0	0	0	0	0	0
22	PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BSPS PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA TENGAH	1 Laporan	3.775.454.000	3.775.454.000	0	0	0	0	0	0
23	PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BSPS PERDESAAN DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	1 Laporan	4.016.495.000	4.016.495.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL			201.030.679.000	200.031.712.000	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Unor : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
No.	Nama Paket	Output	Pagu Pengadaan (Rp.)	Pagu RKAKL (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Progres (%)		Progres Fisik		
						Keu	Fisik	Jan	Feb	Mar

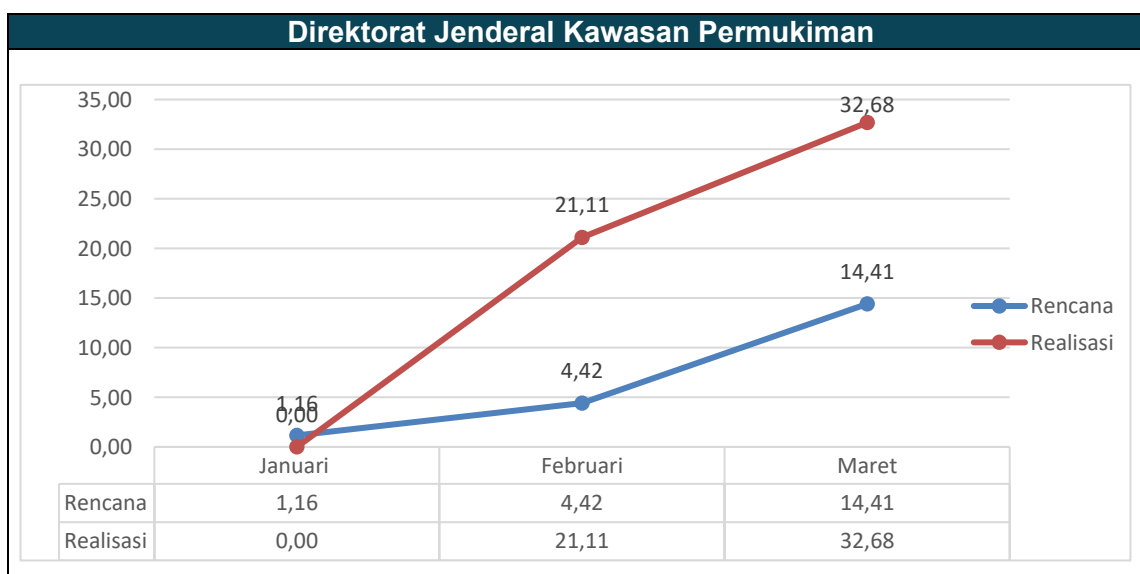
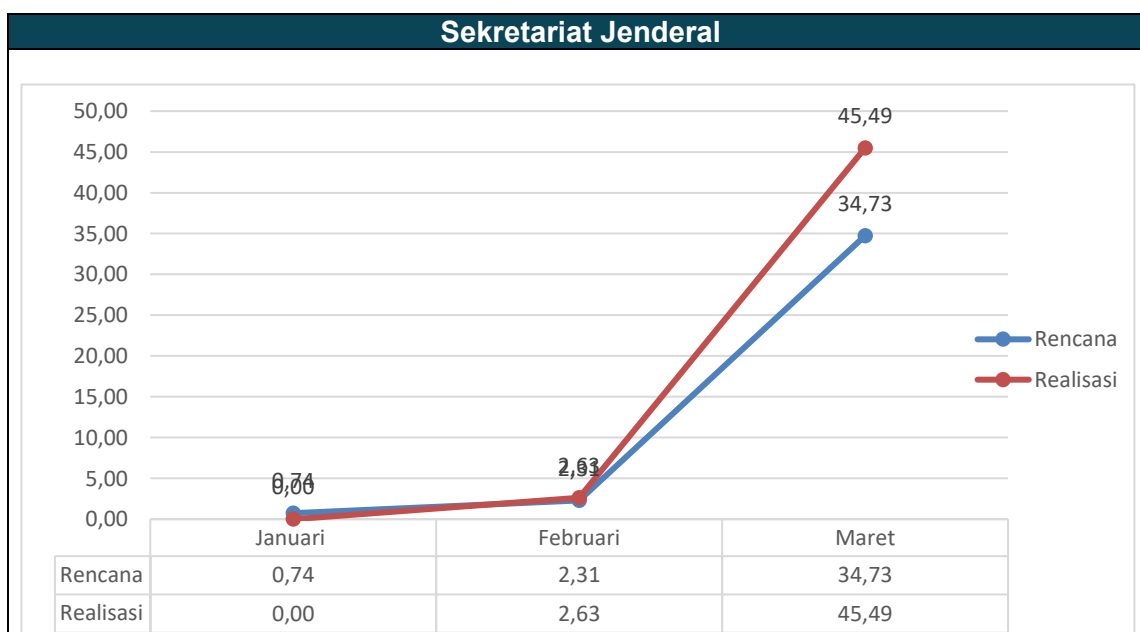
1	Pengendalian Program Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan di Satker PKP Provinsi Papua	1 Laporan	30.186.000	27.610.000	0	0	0	0	0	0
2	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0
3	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA SELATAN	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0
4	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA TENGAH	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0
5	PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	300 Unit	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0
6	PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA	1 Layanan	815.532.000	680.532.000	0	0	0	0	0	0
7	PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA SELATAN	1 Layanan	894.585.000	784.585.000	0	0	0	0	0	0
8	PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA TENGAH	1 Layanan	1.103.866.000	843.442.000	0	0	0	0	0	0

9	PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	1 Layanan	1.587.292.000	1.039.216.000	0	0	0	0	0	0
10	Layanan Umum Direktorat Pembangunan perumahan Perkotaan	1 Layanan	14.800.000	14.800.000	0	0	0	0	0	0
11	Perencanaan Penanganan Kumuh Perkotaan	1 Paket	140.267.000	140.267.000	0	0	0	0	0	0
12	Pelaksanaan Penanganan Kumuh Perkotaan	15 Hektar	8.743.324.000	8.743.324.000	0	0	0	0	0	0
13	Supervisi Penanganan Kumuh Perkotaan	1 Paket	280.000.000	280.000.000	0	0	0	0	0	0
14	Pengawasan Pengendalian Penanganan Kumuh Perkotaan	1 Layanan	187.557.000	162.557.000	0	0	0	0	0	0
15	Perencanaan Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	1 Paket	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0
16	Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	200 Unit	2.280.000.000	2.280.000.000	0	0	0	0	0	0
17	Supervisi Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	1 Paket	57.000.000	57.000.000	0	0	0	0	0	0
18	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Sanitasi Perumahan Perkotaan	1 Layanan	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL			52.197.409.000	51.116.333.000	0	0	0	0.00	0.00	0.00

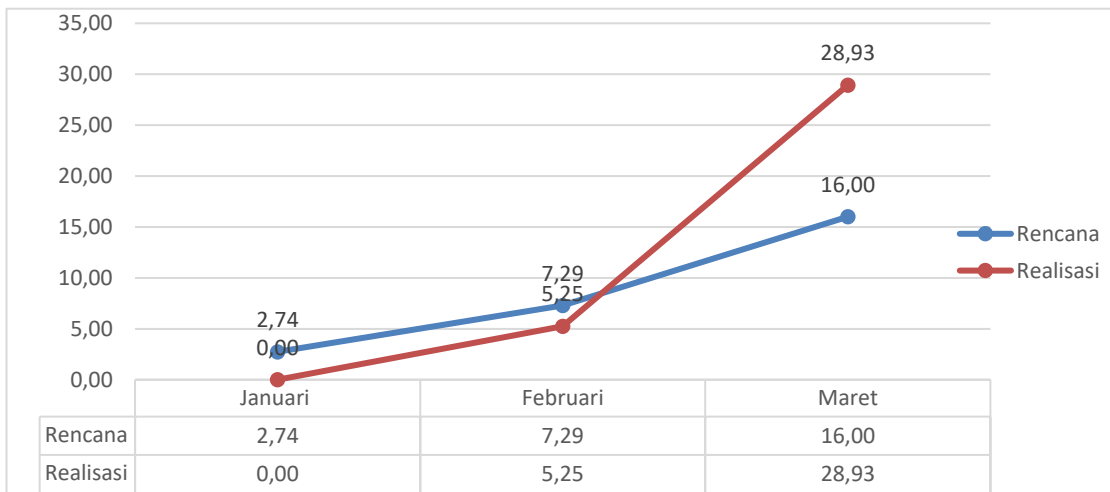
Diagram perbandingan antara target dan realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan di lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja PKP Papua pada triwulan I TA. 2026 dapat dilihat pada diagram kurva-S berikut:

Diagram Kurva-S Keuangan Triwulan I Tahun Anggaran 2026

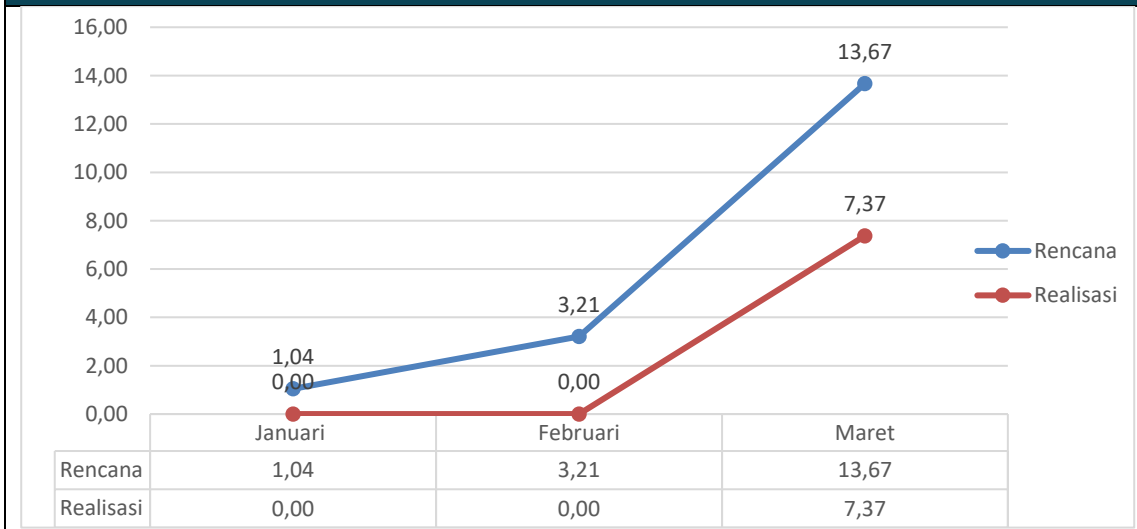
Satker Balai P3KP Papua I



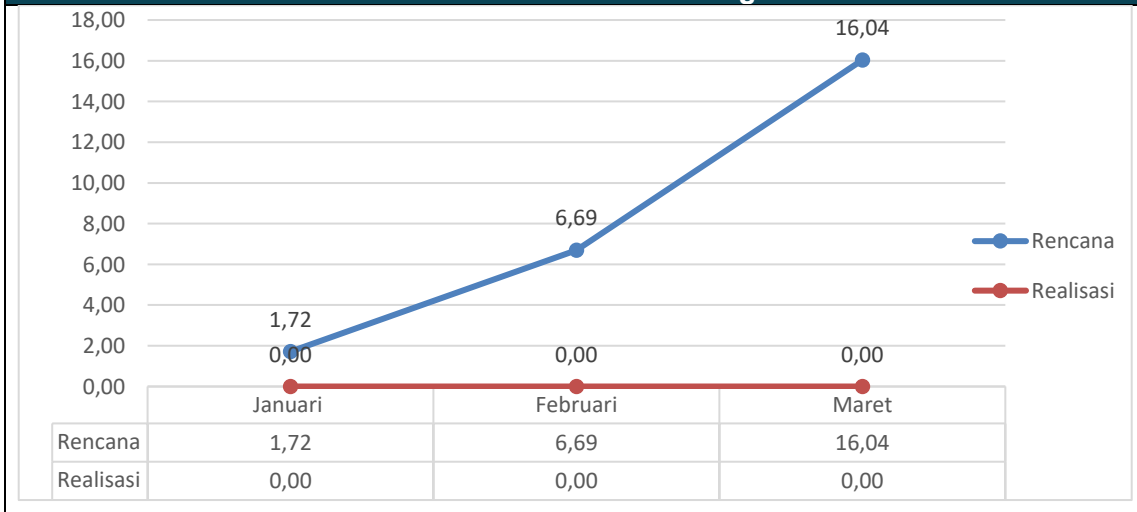
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

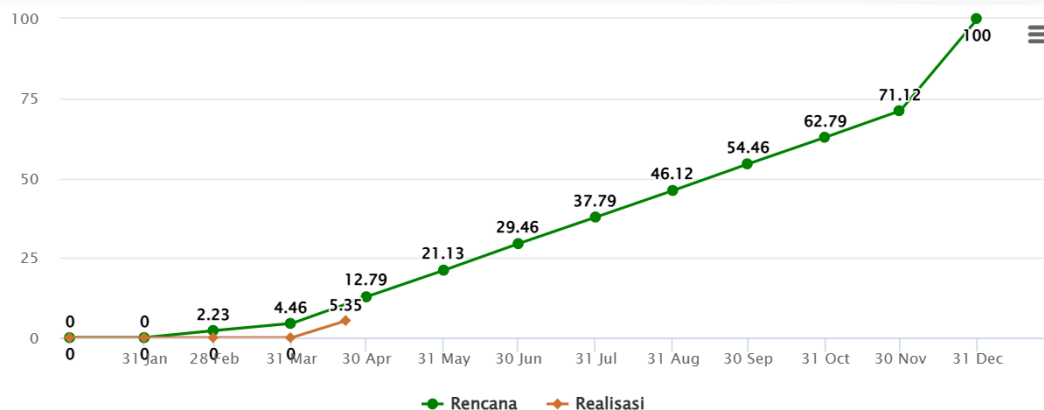


Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



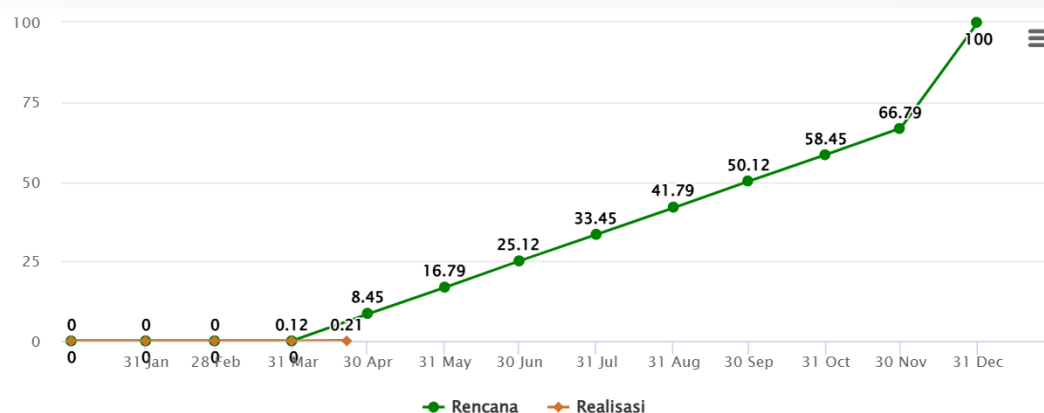
Sekretariat Jenderal

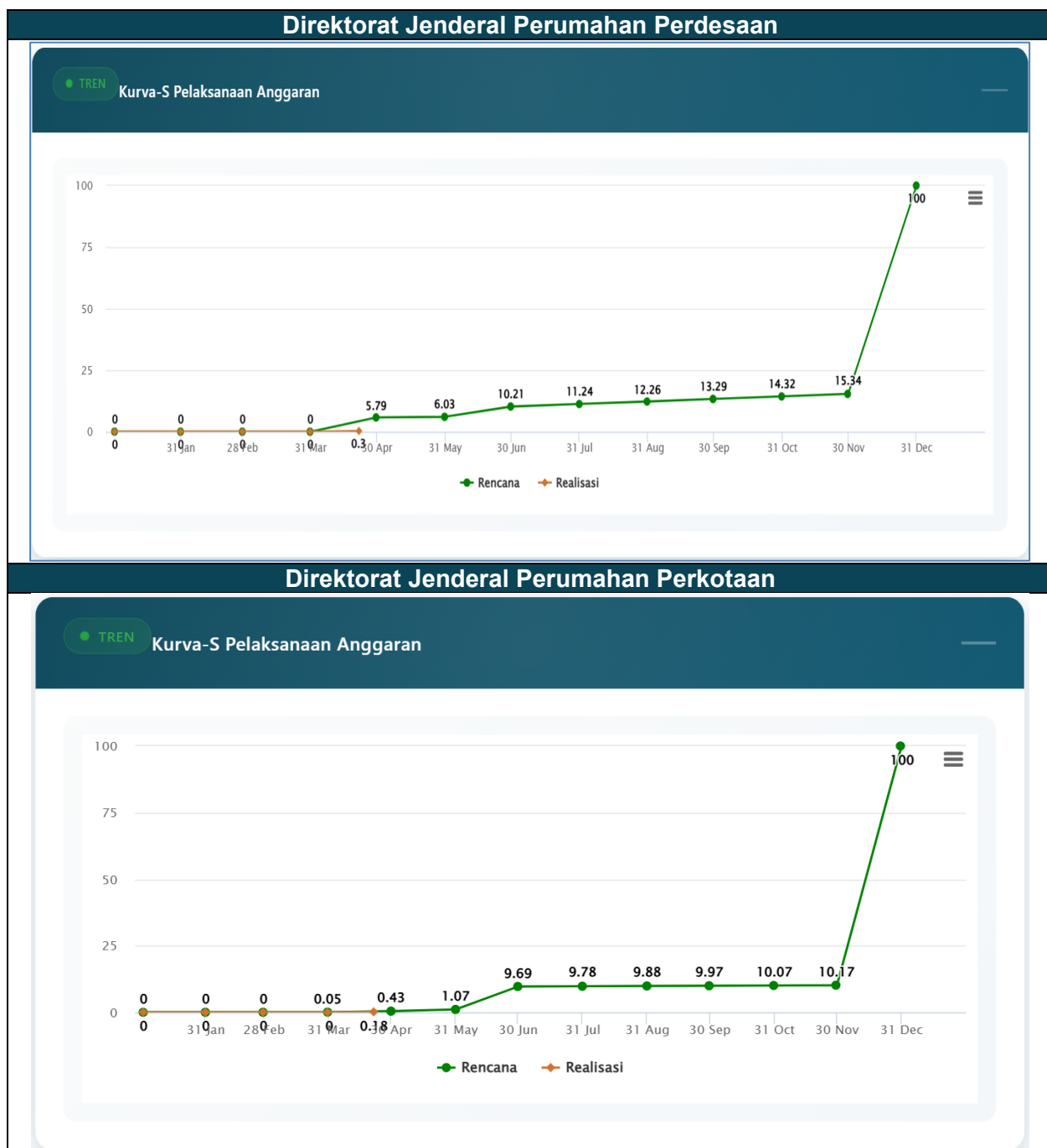
TREN Kurva-S Pelaksanaan Anggaran



Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

TREN Kurva-S Pelaksanaan Anggaran





Sumber : <https://mypkp.go.id/>

Selanjutnya Kegiatan-Kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan Satuan Kerja PKP Papua yang terlaksana pada triwulan I TA. 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan pemanfaatan Teknologi Pembangunan Rumah Cepat (RISHA, RUSPIN, dan Bata *Interlock*) dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas dan pemahaman penanganan perumahan pascabencana;
2. Konsolidasi dan Sinkronisasi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Semester II Tahun 2025

3. Rapat Koordinasi Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan
4. Mengikuti Forum Peningkatan Integritas Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman TA. 2026.
6. Rapat Sosialisasi Penyelenggaraan SAKIP dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029.
7. Mengikuti Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI dan Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan.
8. Bimbingan Teknis Strategi Peningkatan Engagement dan Pengelolaan Media Sosial Kementerian PKP Tahun 2026.
9. Verifikasi Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2026 di:
 - Kota Jayapura, Provinsi Papua (26 Februari 2026)
 - Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua – Delineasi Pesisir (27 Februari – 3 Maret 2026)
 - Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan (27 Februari – 7 Maret 2026)
10. Pendampingan Dirjen TKPR Melakukan Survei Hasil Pembangunan Rumah dalam Rangka Mendukung Program 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan, di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo
11. Verifikasi Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2026 di:
 - Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori
 - Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan – Delineasi Perdesaan
 - Kota Jayapura, Provinsi Papua
 - Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
12. Koordinasi Peninjauan Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan
13. Serah Terima Kunci Rumah Susun dan Rumah Khusus ASN Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke
14. Pendampingan Kunjungan Dirjen TKPR dan Tim dalam Memastikan Ketersediaan Penyedia Jasa OAP dan Kelengkapan Dokumen Administrasi Persiapan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan
15. Verifikasi Teknis Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kota Jayapura, Provinsi Papua

BAB III PENUTUP

3.1 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Pada Laporan Triwulan I satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I dan satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua belum terdapat banyak permasalahan mengingat proses pekerjaan fisik belum banyak berjalan. Namun dalam mencapai target kinerja pelaksanaan kegiatan di triwulan I masih terdapat permasalahan pada beberapa item pekerjaan. Berikut merupakan rincian permasalahan yang dan tindak lanjut pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026:

Permasalahan Triwulan I (Januari - Maret) 2026	Rencana Tindak Lanjut Permasalahan	Realisasi Tindak Lanjut
SATKER BP3KP PAPUA I		
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman		
❖ Belum tersedianya anggaran perjalanan dinas untuk koordinasi rencana program pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan		
Program: Dukungan Manajemen		
❖ Pengadaan kursi dan meja terkendala dikarenakan kamar anggaran yang tidak sesuai antara kontrak pengadaan dan RKAKL, sehingga perlu dilakukan revisi POK	❖ Akan dilakukan percepatan proses revisi dan penyesuaian POK dengan memasukkan pagu anggaran pengadaan kursi dan meja ke dalam dokumen POK yang berlaku.	❖ Saat ini proses revisi POK sedang dalam tahap pelaksanaan. Penyesuaian dokumen POK untuk mengakomodasi pagu anggaran pengadaan kursi dan meja tengah diproses
SATKER PKP PROVINSI PAPUA		
Rumah Swadaya		

❖ Keterlambatan dan Ketidakmerataan Verifikasi Teknis • Beberapa lokasi telah selesai verifikasi (Kota Jayapura, Nabire, Dogiyai, Mappi), namun sebagian lainnya masih dalam tahap pelaksanaan atau persiapan (Mamberamo Raya, Asmat, Nduga). • Hal ini menyebabkan progres tidak seragam antar kabupaten. ❖ Aksesibilitas Lokasi • Lokasi di Mamberamo Raya, Asmat, dan Nduga sulit dijangkau. • Kendala transportasi berupa kebutuhan penyewaan speedboat atau kendaraan khusus dengan biaya tinggi. • Faktor geografis dan keterpencilan wilayah memperlambat proses verifikasi. ❖ Biaya Transportasi dan Risiko Keselamatan • Biaya transportasi ke lokasi verifikasi cukup besar, membebani anggaran operasional. • Di Nduga, selain biaya tinggi, terdapat risiko keselamatan bagi tim verifikasi. ❖ Keterbatasan Infrastruktur Pendukung • Keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi di beberapa kabupaten memperlambat koordinasi dan pelaporan hasil verifikasi.	❖ Percepatan Verifikasi Teknis • Menyelesaikan verifikasi di kabupaten yang masih dalam tahap pelaksanaan/persiapan (Mamberamo Raya, Asmat, Nduga). • Menetapkan target waktu penyelesaian agar progres lebih merata. ❖ Optimalisasi Dukungan Transportasi • Menyediakan anggaran tambahan khusus untuk transportasi di daerah sulit akses. • Mengupayakan kerja sama dengan pemerintah daerah atau pihak ketiga untuk penyediaan sarana transportasi. ❖ Penguatan Koordinasi dan Mitigasi Risiko • Menyusun SOP keselamatan bagi tim verifikasi di daerah rawan. • Memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengurangi hambatan lapangan. ❖ Monitoring dan Evaluasi Berkala • Melakukan evaluasi mingguan atas progres verifikasi di setiap kabupaten. • Menyusun laporan perkembangan sebagai dasar pengambilan keputusan di tingkat pusat.	
Sanitasi		
Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah TA 2026 akan berjalan di Triwulan II		
PSU		
Kegiatan Bantuan PSU TA 2026 direncanakan pada Triwulan II		
Rumah Susun		

2.200 Unit Rumah Bagi Masyarakat Papua Pegunungan

❖ Kesiapan Lokasi - Sebagian lokasi usulan masih memerlukan verifikasi status lahan dan kepastian kesiapan pembangunan. - Kondisi topografi di beberapa titik bergelombang hingga cukup curam, sehingga berpotensi menambah kompleksitas desain dan metode konstruksi. - Aksesibilitas terbatas serta kondisi geografis yang menantang menyebabkan tingginya biaya logistik dan memperpanjang waktu pelaksanaan. ❖ Kesesuaian RTRW - Berdasarkan data RTRW, terdapat ketidaksesuaian yang cukup besar: dari total 2.162 titik, hanya 643 lokasi yang sesuai, 262 dipertimbangkan, dan 1.257 tidak sesuai. - Kabupaten Mamberamo Tengah, Yahukimo, dan Nduga menunjukkan keterbatasan signifikan dengan mayoritas lokasi berada di zona tidak sesuai. ❖ Distribusi dan Alokasi - Penyebaran unit rumah di delapan kabupaten belum merata, dengan beberapa wilayah memiliki jumlah distrik yang besar namun keterbatasan kesiapan lahan. - Keterbatasan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah menyebabkan keterlambatan dalam penetapan lokasi prioritas.	❖ Percepatan Verifikasi - Melakukan verifikasi status lahan secara intensif dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat kampung. - Menyusun berita acara kesepakatan lahan untuk memastikan legalitas dan menghindari sengketa di kemudian hari. ❖ Penyesuaian Desain dan Metode - Menyesuaikan desain rumah dengan kondisi topografi (rumah panggung, fondasi bertingkat). - Menggunakan metode konstruksi modular untuk mempercepat pembangunan di lokasi sulit. ❖ Optimalisasi Logistik - Menyusun rencana distribusi material dengan dukungan transportasi udara dan sungai. - Mengajukan tambahan anggaran logistik serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk efisiensi biaya. ❖ Penguatan Kebijakan RTRW - Melakukan kajian kebijakan tata ruang bersama pemerintah daerah untuk lokasi yang “dipertimbangkan”. - Mengusulkan revisi RTRW terbatas agar mendukung percepatan pembangunan	
--	--	--

	perumahan di wilayah prioritas. ❖ Monitoring dan Evaluasi • Menetapkan mekanisme monitoring mingguan di lapangan dan evaluasi triwulanan di tingkat provinsi. • Melaporkan progres secara transparan kepada Kementerian dan pemangku kepentingan terkait.	
Rumah Susun Mitra Misi Baptis Jayawijaya		
❖ Gangguan Sosial dan Keamanan Pekerjaan penutup atap tidak dapat dilanjutkan karena terjadi kerusuhan pasca Pilkada di sekitar lokasi pembangunan. Kondisi ini mengakibatkan akses kerja ditutup oleh masyarakat sehingga pelaksanaan fisik terhambat. ❖ Pengakhiran Kontrak Walaupun progres fisik dan keuangan telah mencapai target sesuai rencana, pekerjaan penutup atap tidak terselesaikan sepenuhnya. Hal ini menimbulkan deviasi antara hasil opname fisik (60,617%) dengan realisasi keuangan yang sudah penuh.	❖ Penghentian Pekerjaan Penutup Atap Dilakukan penghentian resmi terhadap pekerjaan penutup atap karena akses kerja tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. ❖ Audit oleh BPKP Proses audit sedang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran serta menilai dampak dari penghentian pekerjaan.	❖ Aspek Keuangan: meskipun realisasi keuangan tercatat 100%, hasil fisik belum sepenuhnya sesuai target sehingga perlu evaluasi lebih lanjut. ❖ Aspek Administrasi: pengakhiran kontrak menjadi langkah formal untuk menutup paket pekerjaan, namun tindak lanjut audit akan menentukan rekomendasi penyelesaian. ❖ Aspek Program kondisi sosial-politik di sekitar lokasi pembangunan menjadi faktor eksternal yang signifikan dan harus diantisipasi dalam perencanaan proyek berikutnya.

LAMPIRAN
Dokumentasi Kegiatan Balai P3KP Papua I
Triwulan I (Januari – Maret) TA. 2026

BULAN JANUARI



Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Pembangunan Rumah Cepat (RISHA, RUSPIN, dan Bata *Interlock*)
(12-16 Januari 2026)





Konsolidasi dan Sinkronisasi Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Semester II Tahun 2025
(21-24 Januari 2026)



Rapat Koordinasi Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan
(26-28 Januari 2026)



Mengikuti Forum Peningkatan Integritas Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
(28 Januari – 2 Februari 2026)

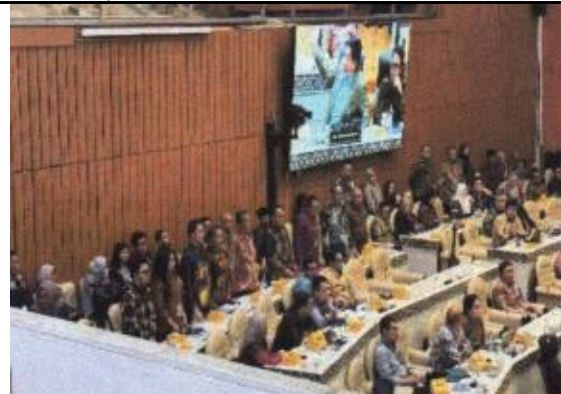
BULAN FEBRUARI



Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman TA. 2026
(2 – 4 Februari 2026)



Rapat Sosialisasi Penyelenggaraan SAKIP dan Rencana Strategis Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029
(3-8 Februari 2026)



Mengikuti Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI dan Rapat Lanjutan Pembahasan
Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
(11-13 Februari 2026)



Bimbingan Teknis Strategi Peningkatan Engagement dan Pengelolaan Media Sosial
Kementerian PKP Tahun 2026
(17-21 Februari 2026)



Melaksanakan Verifikasi Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA.2026
(26 Februari 2026)



Kegiatan Verifikasi Teknis BSPS di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, Delineasi Pesisir
TA. 2026
(27 Februari – 3 Maret 2026)



Kegiatan Verifikasi Teknis BSPS di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan
(27 Februari – 7 Maret 2026)



Kegiatan Verifikasi Teknis BSPS di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan
(27 Februari – 7 Maret 2026)

BULAN MARET



Pendampingan Dirjen TKPR Melakukan Survei Hasil Pembangunan Rumah di Kab. Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Guna Mendukung Program 2.200 Unit Rumah di Papua Pegunungan
(1-2 Maret 2026)



Pendampingan Dirjen TKPR Melakukan Survei Hasil Pembangunan Rumah di Kab. Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Guna Mendukung Program 2.200 Unit Rumah di Papua Pegunungan
(3-4 Maret 2026)



Kegiatan Verifikasi Teknis BSPS di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2026
(3-8 Maret 2026)



Koordinasi Peninjauan Progres Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan
(6-7 Maret 2026)



Kegiatan Verifikasi Teknis BPS di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan,
Delineasi Perdesaan TA. 2026
(3-11 Maret 2026)



Serah Terima Kunci Rumah Susun dan Rumah Khusus ASN Pemerintah Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke
(8-10 Maret 2026)



Verifikasi Teknis BPS di Kota Jayapura, Provinsi Papua
(27-28 Maret 2026)





Verifikasi Teknis BPS di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
(30 Maret – 3 April 2026)



Pendampingan Kunjungan Dirjen TKPR dan Tim dalam Memastikan Ketersediaan Penyedia Jasa OAP dan Kelengkapan Dokumen Administrasi Persiapan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan
(31 Maret – 2 April 2026)



Kegiatan Verifikasi Teknis Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Kota Jayapura, Provinsi Papua (31 Maret – 2 April 2026)

L A P O R A N K I N E R J A

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PAPUA I